

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Kondisi Perkembangan Inflasi Daerah

Berdasarkan dokumen monitoring TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, perkembangan inflasi daerah dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat. TPID secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga, ketersediaan stok, distribusi, dan potensi gangguan pasokan sebagai langkah antisipasi inflasi.

Inflasi di Kabupaten Bondowoso lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok **bahan pangan bergejolak (volatile food)** dibandingkan kelompok inti. Hal ini terlihat dari fokus monitoring terhadap komoditas:

- beras
- cabai merah
- cabai rawit
- bawang merah
- bawang putih
- minyak goreng
- gula pasir
- telur ayam ras
- daging ayam ras
- daging sapi
- LPG
- BBM
- pupuk.

Komoditas-komoditas tersebut menjadi perhatian utama karena memiliki kontribusi besar terhadap perubahan harga di tingkat konsumen.

1. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Berdasarkan hasil monitoring dari Diskoperindag dan instansi terkait, perkembangan harga menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan distribusi.

1. Beras

Beras merupakan komoditas paling strategis karena menjadi makanan pokok masyarakat.

Dari laporan monitoring diketahui bahwa:

- stok beras terus dipantau melalui Perum Bulog
- pemerintah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia
- distribusi beras dijaga agar tidak terjadi kelangkaan.

Risiko kenaikan harga beras umumnya berasal dari:

- musim kemarau
- penurunan hasil panen

meningkatnya permintaan masyarakat.

2. Cabai Merah dan Cabai Rawit

Cabai merupakan komoditas yang paling sering mengalami fluktuasi harga.

Penyebabnya antara lain:

- perubahan cuaca
- gagal panen
- serangan hama
- berkurangnya produksi petani
- tingginya permintaan pada hari besar keagamaan.

Karena sifatnya yang mudah rusak (perishable), harga cabai dapat berubah dalam waktu singkat.

3. Bawang Merah dan Bawang Putih

Harga bawang relatif dipengaruhi oleh:

- musim panen,
- pasokan dari daerah sentra,
- kelancaran distribusi.

Apabila distribusi terganggu atau produksi menurun, harga bawang cenderung meningkat.

4. Minyak Goreng

Monitoring menunjukkan minyak goreng tetap menjadi komoditas yang terus diawasi karena:

- banyak digunakan rumah tangga
- digunakan oleh pelaku UMKM.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan:

- stok tersedia
- distribusi berjalan normal
- tidak terjadi penimbunan.

5. Gula Pasir

Harga gula relatif lebih stabil dibandingkan komoditas hortikultura, namun tetap dipantau terutama menjelang:

- Ramadan
- Idul Fitri
- Natal
- Tahun Baru.

Pada periode tersebut permintaan masyarakat meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga.

6. Telur Ayam Ras dan Daging Ayam

-

Komoditas peternakan dipantau oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Harga dipengaruhi oleh:

- biaya pakan,
- produksi peternak,
- permintaan masyarakat.

Ketersediaan produksi lokal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

7. Daging Sapi

Harga daging sapi relatif lebih tinggi dibandingkan komoditas pangan lainnya.

Kenaikan harga biasanya terjadi ketika:

- permintaan meningkat,
- pasokan ternak menurun.

1. Perkembangan Barang Strategis Lainnya

2. BBM

Berdasarkan monitoring terhadap SPBU:

- stok BBM dipastikan aman,
- distribusi berjalan lancar,
- tidak ditemukan gangguan distribusi yang signifikan.

Kelancaran distribusi BBM sangat penting karena memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang.

2. LPG

Monitoring LPG dilakukan bersama Pertamina dan aparat pengawas.

Fokus pengawasan meliputi:

- ketersediaan stok
- distribusi ke pangkalan
- penyaluran kepada masyarakat.

LPG menjadi komoditas strategis karena digunakan hampir seluruh rumah tangga.

3. Pupuk

Monitoring pupuk dilakukan bersama Pupuk Indonesia.

Yang dipantau meliputi:

- stok pupuk bersubsidi
- distribusi
- penyaluran kepada petani.

Ketersediaan pupuk sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian sehingga berpengaruh terhadap harga pangan pada musim berikutnya.

1. Perkembangan Harga Jasa

Meskipun dokumen lebih banyak membahas komoditas pangan, secara tidak langsung harga jasa dipengaruhi oleh:

- biaya transportasi
- harga BBM
- kelancaran distribusi.

Apabila distribusi terganggu atau biaya logistik meningkat, maka harga jasa angkutan dan distribusi barang juga berpotensi naik sehingga memberi tekanan pada inflasi daerah.

1. Faktor Pendukung Stabilitas Harga

Dokumen TPID menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga stabilitas harga, antara lain:

1. monitoring harga secara berkala
2. koordinasi lintas instansi melalui TPID
3. Gerakan Pangan Murah (GPM)
4. operasi pasar apabila diperlukan
5. pengawasan distribusi barang
6. menjaga stok Bulog
7. pengawasan distribusi LPG
8. pengawasan distribusi BBM
9. monitoring pupuk bersubsidi
10. koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah penimbunan.

Upaya tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga gejolak harga dapat ditekan.

1. Risiko Inflasi ke Depan

Berdasarkan keseluruhan dokumen monitoring TPID, beberapa risiko yang perlu diwaspadai adalah:

1. Risiko Cuaca

Perubahan cuaca berpotensi menyebabkan:

- gagal panen,
- penurunan produksi,
- kenaikan harga komoditas hortikultura.

2. Risiko Distribusi

Gangguan distribusi akibat:

- kerusakan jalan
- cuaca ekstrem
- keterlambatan pengiriman

dapat menghambat pasokan barang sehingga memicu kenaikan harga.

3. Risiko Musim Hari Besar Keagamaan

Menjelang:

- Ramadan
- Idul Fitri
- Natal
- Tahun Baru

permintaan masyarakat meningkat sehingga harga beberapa komoditas berpotensi naik.

4. Risiko Ketersediaan Pupuk

Apabila distribusi pupuk terganggu maka:

- produktivitas pertanian menurun
- hasil panen berkurang
- harga pangan berpotensi meningkat pada musim berikutnya.

5. Risiko Energi

Gangguan pasokan:

- BBM
- LPG

akan meningkatkan biaya distribusi dan biaya produksi sehingga memberikan tekanan inflasi.

6. Risiko Perubahan Harga Nasional

Harga beberapa komoditas masih dipengaruhi kondisi nasional sehingga perubahan harga di tingkat nasional dapat berdampak pada harga di Kabupaten Bondowoso.

Kesimpulan

Berdasarkan dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, perkembangan inflasi daerah masih didominasi oleh dinamika harga komoditas pangan strategis (volatile food), terutama beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, telur, dan daging. Sementara itu, ketersediaan BBM, LPG, dan pupuk terus dipantau untuk menjaga kelancaran distribusi serta mendukung stabilitas harga. TPID Bondowoso secara aktif melakukan monitoring, koordinasi lintas sektor, Gerakan Pangan Murah, pengawasan distribusi, serta pengamanan stok untuk mengendalikan tekanan inflasi. Risiko utama ke depan berasal dari faktor cuaca, gangguan distribusi, peningkatan permintaan pada hari besar keagamaan, ketersediaan pupuk, dan dinamika harga di tingkat nasional

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Strategis

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso adalah tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas tersebut memiliki karakteristik produksi yang sangat bergantung pada kondisi cuaca sehingga harga dapat berubah secara cepat dalam waktu singkat.

Selain komoditas hortikultura, harga beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir juga memerlukan pemantauan secara berkala karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ketika terjadi gangguan pasokan atau peningkatan permintaan, harga komoditas tersebut berpotensi mengalami kenaikan dan memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.

1. Ketergantungan Produksi pada Faktor Cuaca

Berdasarkan laporan monitoring sektor pertanian, produktivitas pertanian di Kabupaten Bondowoso masih sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Risiko seperti musim kemarau berkepanjangan, curah hujan yang tinggi, maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat menurunkan hasil panen.

Penurunan produksi menyebabkan berkurangnya pasokan di pasar sehingga harga komoditas pangan meningkat. Oleh karena itu, faktor cuaca menjadi salah satu sumber risiko utama dalam pengendalian inflasi daerah.

1. Kelancaran Distribusi Komoditas

Dokumen monitoring menunjukkan bahwa distribusi menjadi salah satu aspek yang terus diawasi oleh TPID. Meskipun secara umum distribusi berjalan lancar, terdapat potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas harga, antara lain:

- keterlambatan pengiriman barang
- hambatan transportasi
- meningkatnya biaya distribusi
- distribusi yang tidak merata ke seluruh wilayah.

Apabila distribusi terganggu, pasokan barang di pasar menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

1. Ketersediaan Cadangan Pangan

Permasalahan lain adalah pentingnya menjaga kecukupan stok pangan, khususnya beras. Oleh karena itu, Perum Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Jika cadangan pangan tidak mencukupi ketika terjadi peningkatan permintaan atau penurunan produksi, pemerintah akan lebih sulit melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga.

1. Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dokumen dari Pupuk Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu fokus TPID. Permasalahan yang perlu diantisipasi meliputi:

- keterlambatan penyaluran pupuk
- ketidaksesuaian distribusi dengan kebutuhan petani
- potensi kekurangan stok di tingkat kios atau pengecer.

Apabila petani mengalami keterlambatan memperoleh pupuk, produktivitas pertanian dapat menurun sehingga berdampak pada pasokan pangan dan kenaikan harga pada musim panen berikutnya.

1. Ketersediaan BBM dan LPG

BBM dan LPG merupakan komoditas strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumen monitoring menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan stok tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.

Permasalahan yang perlu diantisipasi antara lain:

- keterlambatan distribusi
- peningkatan konsumsi pada periode tertentu
- potensi kelangkaan akibat gangguan distribusi.

Gangguan pada komoditas energi dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang sehingga memberikan tekanan terhadap inflasi.

1. Peningkatan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Dokumen TPID menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok meningkat menjelang Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa komoditas strategis berpotensi mengalami kenaikan harga apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Oleh karena itu, TPID secara rutin melaksanakan:

- monitoring harga
- Gerakan Pangan Murah (GPM)
- koordinasi lintas instansi
- pemantauan stok.

1. Perlunya Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Pengendalian inflasi melibatkan banyak instansi, antara lain:

- Diskoperindag
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Perum Bulog
- Pupuk Indonesia
- Polres Bondowoso
- Kodim 0822
- perangkat daerah lainnya.

Banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan bahwa koordinasi menjadi faktor penting. Apabila koordinasi tidak berjalan optimal, respons terhadap kenaikan harga maupun gangguan distribusi menjadi kurang efektif.

1. Potensi Praktik Penimbunan dan Gangguan Distribusi

Keterlibatan Polres Bondowoso dan Kodim 0822 dalam kegiatan TPID menunjukkan bahwa aspek pengawasan distribusi juga menjadi perhatian. Potensi praktik penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan mendorong kenaikan harga.

Oleh karena itu, pengawasan bersama dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi serta mencegah praktik yang dapat mengganggu stabilitas harga.

Ringkasan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi dari dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, permasalahan utama dalam pengendalian inflasi daerah meliputi:

No	Permasalahan	Dampak terhadap Inflasi
1	Fluktuasi harga komoditas pangan strategis	Meningkatkan inflasi volatile food
2	Produksi pertanian dipengaruhi cuaca	Menurunkan pasokan dan memicu kenaikan harga
3	Potensi gangguan distribusi	Menghambat ketersediaan barang di pasar
4	Perlunya menjaga cadangan beras	Mengurangi kemampuan intervensi pasar saat harga naik
5	Distribusi pupuk bersubsidi	Berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan pasokan pangan
6	Ketersediaan BBM dan LPG	Mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi
7	Peningkatan permintaan saat HBKN	Menyebabkan lonjakan harga jika pasokan tidak mencukupi
8	Koordinasi lintas instansi	Menentukan efektivitas pengendalian inflasi

No Permasalahan

9 Potensi penimbunan dan gangguan distribusi

Dampak terhadap Inflasi

Menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga

Kesimpulan

Berdasarkan dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, pengendalian inflasi di daerah menghadapi tantangan yang berasal dari sisi **pasokan, distribusi, dan permintaan**. Permasalahan utama meliputi fluktuasi harga komoditas pangan strategis, ketergantungan produksi terhadap kondisi cuaca, kelancaran distribusi barang, ketersediaan cadangan pangan, distribusi pupuk bersubsidi, serta potensi peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain itu, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi dan pengawasan distribusi agar pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap stabil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan secara terpadu melalui **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya berfokus pada pengendalian harga, tetapi juga pada upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam dokumen TPID Tahun 2026 terlihat bahwa koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, dan evaluasi perkembangan harga serta ketersediaan komoditas strategis. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah mengambil langkah cepat apabila ditemukan potensi kenaikan harga atau gangguan pasokan.

1. Monitoring Harga dan Ketersediaan Komoditas Strategis

Salah satu kebijakan utama yang dilaksanakan adalah **monitoring harga secara berkala** terhadap komoditas kebutuhan pokok dan barang penting.

Monitoring dilakukan pada komoditas seperti:

- beras
- gula pasir
- minyak goreng
- cabai merah
- cabai rawit
- bawang merah
- bawang putih
- telur ayam ras
- daging ayam ras

- daging sapi
- LPG
- BBM
- pupuk bersubsidi.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk:

- mengetahui perkembangan harga di pasar
- memastikan ketersediaan stok
- mengidentifikasi potensi kenaikan harga sejak dini
- menjadi dasar pengambilan kebijakan TPID.

Hasil monitoring kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi TPID sebagai dasar penentuan langkah pengendalian.

1. Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan

Berdasarkan dokumen TPID, pemerintah daerah berupaya menjaga pasokan pangan melalui koordinasi dengan berbagai instansi, terutama:

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Perum Bulog.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:

- pemantauan produksi pertanian
- pemantauan hasil panen
- pengawasan stok pangan
- pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog apabila diperlukan.

Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat sehingga gejolak harga dapat diminimalkan.

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Salah satu kebijakan yang paling menonjol dalam dokumen TPID Tahun 2026 adalah pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM)**.

Program ini dilaksanakan untuk:

- menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau
- membantu masyarakat memperoleh bahan pangan saat harga pasar meningkat
- menekan laju inflasi daerah.

Komoditas yang dipasarkan dalam kegiatan ini umumnya meliputi:

- beras
- minyak goreng
-

- gula pasir
- telur
- berbagai komoditas pangan strategis lainnya.

Pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari strategi stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

1. Pengawasan Distribusi Barang

Pelaksanaan kebijakan inflasi juga dilakukan melalui pengawasan distribusi komoditas strategis.

Pengawasan ini melibatkan:

- Diskoperindag
- Polres Bondowoso
- Kodim 0822
- instansi terkait lainnya.

Fokus pengawasan meliputi:

- kelancaran distribusi barang
- ketersediaan stok di pasar
- pencegahan penimbunan barang
- pengawasan jalur distribusi.

Kebijakan ini bertujuan memastikan barang kebutuhan pokok dapat sampai kepada masyarakat tanpa hambatan yang dapat memicu kenaikan harga.

1. Monitoring BBM dan LPG

Dokumen monitoring menunjukkan bahwa TPID juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan energi, khususnya:

- BBM
- LPG.

Monitoring dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan:

- stok tersedia
- distribusi berjalan lancar
- tidak terjadi kelangkaan.

Kebijakan ini penting karena BBM dan LPG berpengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi berbagai komoditas kebutuhan pokok.

1. Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi

-

Dokumen dari Pupuk Indonesia menunjukkan adanya pelaksanaan monitoring terhadap distribusi pupuk bersubsidi.

Kegiatan tersebut meliputi:

- pemantauan stok pupuk
- pengawasan penyaluran kepada petani
- koordinasi apabila terjadi kekurangan pasokan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga produktivitas sektor pertanian sehingga pasokan pangan tetap terjaga dan risiko inflasi akibat penurunan produksi dapat ditekan.

1. Penguatan Produksi Pertanian

Dalam dokumen TPID juga terdapat berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, antara lain:

- Gelar Tanam Raya
- bantuan kepada sektor pertanian
- kegiatan ketahanan pangan
- koordinasi bersama petani.

Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian agar pasokan pangan tetap mencukupi sepanjang tahun.

Dengan meningkatnya produksi, risiko kenaikan harga akibat kekurangan pasokan dapat dikurangi.

1. Koordinasi Melalui Rapat TPID

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dilakukan melalui rapat koordinasi TPID yang dilaksanakan secara berkala.

Rapat tersebut membahas:

- perkembangan harga
- kondisi stok pangan
- hasil monitoring lapangan
- potensi risiko inflasi
- langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga.

Melalui koordinasi tersebut, setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya sehingga pelaksanaan pengendalian inflasi menjadi lebih terintegrasi.

1. Sinergi Antarinstansi

Dokumen TPID menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui sinergi berbagai pihak, antara lain:

- Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- Diskoperindag
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Perum Bulog
- Pupuk Indonesia
- Polres Bondowoso
- Kodim 0822
- instansi pendukung lainnya.

Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan mencakup seluruh aspek pengendalian inflasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga di tingkat konsumen.

1. Implementasi Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Berdasarkan keseluruhan dokumen, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso telah mencerminkan penerapan strategi **4K** yang menjadi pedoman nasional dalam pengendalian inflasi, yaitu:

Strategi 4K	Implementasi di Kabupaten Bondowoso
Keterjangkauan Harga	Monitoring harga secara berkala, Gerakan Pangan Murah, dan stabilisasi harga komoditas strategis.
Ketersediaan Pasokan	Pemantauan produksi pertanian, pengelolaan stok Bulog, pengawasan distribusi pupuk, serta dukungan terhadap peningkatan produksi pangan.
Kelancaran Distribusi	Pengawasan distribusi pangan, BBM, LPG, serta koordinasi dengan Polres dan Kodim untuk menjaga kelancaran penyaluran dan mencegah penimbunan.
Komunikasi Efektif	Rapat koordinasi TPID, monitoring lintas sektor, dan penyampaian hasil pemantauan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi telah dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor dengan mengedepankan strategi **4K**. Implementasi kebijakan meliputi monitoring harga dan stok komoditas strategis, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pengelolaan cadangan beras oleh Bulog, pengawasan distribusi BBM, LPG, dan pupuk bersubsidi, penguatan produksi pertanian melalui program ketahanan pangan, serta pengawasan distribusi bersama aparat keamanan. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga risiko inflasi di Kabupaten Bondowoso dapat diminimalkan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Umum Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, kebijakan pengendalian inflasi telah dilaksanakan secara **terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan**. Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak hanya melakukan pemantauan harga, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas strategis.

Pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi TPID, monitoring harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan distribusi pupuk, BBM, LPG, hingga penguatan sektor pertanian menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

Secara umum, kebijakan yang diterapkan telah sejalan dengan strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan **4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)**.

1. Evaluasi Berdasarkan Aspek 4K

2. Keterjangkauan Harga

Dari dokumen TPID terlihat bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan monitoring harga di pasar dan melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** sebagai bentuk intervensi ketika terjadi potensi kenaikan harga.

Kebijakan ini dinilai **cukup efektif** karena:

- memberikan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga lebih terjangkau
- membantu menjaga stabilitas harga komoditas strategis
- mengurangi tekanan inflasi terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Namun demikian, fluktuasi harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang masih menjadi tantangan karena sangat dipengaruhi oleh faktor produksi dan kondisi cuaca yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

2. Ketersediaan Pasokan

Dokumen menunjukkan bahwa TPID secara rutin melakukan monitoring terhadap:

- stok beras
- stok Bulog
- produksi pertanian
- produksi peternakan

- pupuk bersubsidi
- LPG
- BBM.

Kebijakan menjaga pasokan dinilai berjalan **cukup baik** karena melibatkan seluruh instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

Keberadaan Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi peningkatan permintaan masyarakat.

Meskipun demikian, ketersediaan pasokan tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti musim tanam dan hasil panen.

3. Kelancaran Distribusi

Berdasarkan laporan monitoring, distribusi komoditas strategis terus diawasi oleh pemerintah daerah bersama Polres Bondowoso dan Kodim 0822.

Evaluasi menunjukkan bahwa:

- distribusi pangan relatif berjalan lancar
- distribusi BBM dan LPG tetap terjaga
- distribusi pupuk bersubsidi diawasi secara berkala.

Kebijakan ini cukup efektif dalam mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasar.

Namun demikian, distribusi masih memiliki potensi gangguan apabila terjadi:

- cuaca ekstrem
- hambatan transportasi
- keterlambatan pengiriman dari daerah pemasok.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi menjadi salah satu aspek yang paling terlihat dalam dokumen TPID.

Hal ini dibuktikan melalui:

- rapat koordinasi TPID
- monitoring bersama lintas instansi
- evaluasi perkembangan harga secara berkala
- koordinasi dengan instansi vertikal.

Evaluasi menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi berjalan dengan baik sehingga setiap perkembangan kondisi lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Evaluasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM)

1.

Berdasarkan risalah kegiatan TPID, **Gerakan Pangan Murah** merupakan salah satu kebijakan yang paling nyata dirasakan masyarakat.

Program ini berhasil:

- menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar
- membantu masyarakat memperoleh bahan pangan ketika harga meningkat
- mendukung stabilisasi harga komoditas strategis.

Meskipun demikian, efektivitas GPM masih bergantung pada:

- waktu pelaksanaan
- jumlah komoditas yang tersedia
- jangkauan lokasi kegiatan.

Apabila pelaksanaan diperluas ke lebih banyak kecamatan, manfaat program diperkirakan akan semakin besar.

1. Evaluasi Pengawasan Distribusi

Dokumen menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, Polres Bondowoso, dan Kodim 0822 dalam melakukan pengawasan distribusi.

Kebijakan ini dinilai mampu:

- mengurangi potensi penimbunan
- menjaga kelancaran distribusi
- memastikan stok tetap tersedia.

Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan salah satu kekuatan TPID Kabupaten Bondowoso dalam menjaga stabilitas harga.

1. Evaluasi Penguatan Sektor Pertanian

Pelaksanaan kegiatan seperti:

- Gelar Tanam Raya
- bantuan sektor pertanian
- kegiatan ketahanan pangan
- monitoring pupuk bersubsidi,

menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga sudah meningkat, tetapi juga melalui upaya menjaga produksi pangan sejak awal.

Pendekatan ini dinilai tepat karena penguatan produksi merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga.

Namun demikian, hasil kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan produktivitas pertanian.

1. Evaluasi Koordinasi Antarinstansi

Dokumen TPID memperlihatkan keterlibatan berbagai instansi, antara lain:

- Diskoperindag
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Perum Bulog
- Pupuk Indonesia
- Polres Bondowoso
- Kodim 0822.

Koordinasi lintas instansi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengendalian inflasi karena setiap instansi menjalankan fungsi yang saling melengkapi.

Evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi yang baik mempercepat identifikasi permasalahan serta penyusunan langkah antisipasi apabila terjadi gejolak harga.

1. Hambatan yang Masih Dihadapi

Meskipun pelaksanaan kebijakan berjalan cukup baik, beberapa kendala masih menjadi perhatian, yaitu:

1. fluktuasi harga komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca
2. ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain untuk beberapa komoditas
3. potensi gangguan distribusi akibat faktor transportasi dan logistik
4. meningkatnya permintaan masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional
5. produktivitas pertanian yang dipengaruhi musim dan ketersediaan pupuk.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi memerlukan upaya yang berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan kondisi.

1. Hasil Evaluasi Keseluruhan

Aspek Evaluasi	Hasil
Monitoring harga	Berjalan secara rutin dan menjadi dasar pengambilan kebijakan TPID.
Ketersediaan pasokan	Relatif terjaga melalui koordinasi dengan Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Pupuk Indonesia.
Distribusi komoditas	Secara umum lancar dengan pengawasan lintas instansi dan aparat keamanan.
Gerakan Pangan Murah	Efektif membantu stabilisasi harga dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Koordinasi lintas sektor	Berjalan baik melalui rapat koordinasi dan monitoring bersama.

Aspek Evaluasi**Hasil**

Hambatan

Dipengaruhi faktor cuaca, distribusi, musim, dan fluktuasi produksi komoditas hortikultura.

Kesimpulan

Berdasarkan dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, kebijakan pengendalian inflasi dapat dinilai **cukup efektif** dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas strategis. Hal ini terlihat dari pelaksanaan monitoring harga secara berkala, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah, pengawasan distribusi pangan, BBM, LPG, dan pupuk bersubsidi, serta koordinasi yang baik antarinstansi melalui TPID. Implementasi kebijakan juga telah mencerminkan penerapan strategi **4K**, sehingga mampu memperkuat pengendalian inflasi dari sisi pasokan, distribusi, maupun komunikasi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas hortikultura, pengaruh kondisi cuaca terhadap produksi pertanian, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan, perluasan jangkauan intervensi pasar, dan peningkatan koordinasi lintas sektor tetap menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso pada masa mendatang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**1. Memperkuat Monitoring Harga dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)**

Berdasarkan dokumen TPID, kegiatan monitoring harga telah berjalan secara rutin. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, monitoring perlu dikembangkan menjadi **sistem peringatan dini (early warning system)** yang mampu mendeteksi potensi kenaikan harga sebelum terjadi gejolak di pasar.

Sistem tersebut dapat memanfaatkan data harian mengenai:

- perkembangan harga komoditas strategis
- ketersediaan stok
- kondisi distribusi
- perkembangan produksi pertanian.

Dengan adanya sistem peringatan dini, TPID dapat mengambil langkah antisipatif lebih cepat, seperti operasi pasar atau redistribusi pasokan sebelum harga mengalami kenaikan yang signifikan.

1. Memperkuat Ketersediaan Pasokan Pangan

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah perlu terus memperkuat ketersediaan

pasokan pangan melalui peningkatan produksi daerah.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- meningkatkan produktivitas pertanian
- memperluas areal tanam komoditas strategis
- mendukung penggunaan benih unggul
- meningkatkan pendampingan kepada petani
- memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat waktu.

Rekomendasi ini sejalan dengan berbagai kegiatan sektor pertanian yang telah dilaksanakan dalam dokumen TPID, seperti Gelar Tanam Raya dan program ketahanan pangan.

1. Optimalisasi Cadangan Pangan Daerah

Dokumen menunjukkan bahwa Perum Bulog berperan penting dalam menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ke depan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan cadangan pangan sebagai instrumen stabilisasi harga.

Cadangan pangan dapat digunakan untuk:

- mengantisipasi kelangkaan pasokan
- menjaga stabilitas harga saat terjadi kenaikan permintaan
- mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan.

Dengan cadangan yang memadai, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan intervensi pasar.

1. Peningkatan Efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu kebijakan yang terbukti membantu menjaga keterjangkauan harga.

Agar manfaatnya semakin besar, pelaksanaan GPM disarankan untuk:

- dilaksanakan secara lebih merata hingga ke seluruh kecamatan
- diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan inflasi yang lebih tinggi
- diselenggarakan sebelum terjadi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- melibatkan lebih banyak produsen lokal dan pelaku usaha pangan.

Dengan demikian, GPM tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat stabilitas harga di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.

1. Memperkuat Kelancaran Distribusi Komoditas Strategis

Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk:

- meningkatkan koordinasi distribusi antarwilayah
- mempercepat penyaluran komoditas strategis
- memastikan distribusi BBM, LPG, dan pupuk tidak mengalami hambatan
- memperkuat pengawasan terhadap potensi penimbunan barang.

Koordinasi dengan Polres Bondowoso, Kodim 0822, serta instansi terkait perlu terus dipertahankan agar distribusi berjalan lancar.

1. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Beberapa komoditas masih bergantung pada pasokan dari luar Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** dengan daerah penghasil komoditas pangan strategis.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk:

- menjamin kontinuitas pasokan
- mengurangi risiko kelangkaan komoditas
- menjaga stabilitas harga apabila produksi lokal mengalami penurunan.

Kebijakan ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah dalam menghadapi gangguan produksi maupun distribusi.

1. Penguatan Koordinasi TPID

Dokumen TPID menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi telah berjalan dengan baik. Ke depan, koordinasi tersebut perlu terus ditingkatkan melalui:

- rapat koordinasi yang lebih intensif pada periode rawan inflasi
- pertukaran data antarinstansi secara cepat
- penyusunan langkah antisipatif berdasarkan hasil monitoring lapangan
- evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan.

Koordinasi yang kuat akan mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terjadi gejolak harga.

1. Penguatan Edukasi kepada Masyarakat

Selain intervensi pemerintah, pengendalian inflasi juga memerlukan partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan edukasi melalui:

- sosialisasi pola konsumsi yang bijak

- pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif
- penyampaian informasi perkembangan harga secara berkala
- edukasi mengenai pentingnya tidak melakukan pembelian secara berlebihan (*panic buying*).

Komunikasi yang efektif dapat membantu menjaga stabilitas permintaan masyarakat.

1. Peningkatan Digitalisasi Monitoring Inflasi

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan pengendalian inflasi.

Sistem tersebut dapat digunakan untuk:

- pelaporan harga secara real time
- monitoring stok komoditas
- pemantauan distribusi
- penyajian dashboard perkembangan inflasi bagi TPID.

Digitalisasi akan meningkatkan kecepatan analisis serta ketepatan pengambilan keputusan.

1. Penguatan Ketahanan Pangan Jangka Panjang

Untuk mengurangi tekanan inflasi pada masa mendatang, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan daerah melalui:

- diversifikasi produksi pertanian
- peningkatan produktivitas komoditas strategis
- pengembangan sentra hortikultura
- peningkatan infrastruktur pertanian dan irigasi
- penguatan kelembagaan petani.

Pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan

No	Rekomendasi	Tujuan
1	Mengembangkan sistem peringatan dini inflasi	Mendeteksi potensi kenaikan harga lebih cepat
2	Memperkuat produksi dan pasokan pangan	Menjaga ketersediaan komoditas strategis
3	Mengoptimalkan cadangan pangan daerah	Mendukung stabilisasi harga melalui intervensi pasar
4	Memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	Meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat
5	Memperkuat distribusi komoditas strategis	Menjamin kelancaran pasokan dan mencegah kelangkaan

No Rekomendasi	Tujuan
6 Memperluas Kerja Sama Antar Daerah	Menjamin kontinuitas pasokan komoditas
7 Meningkatkan koordinasi TPID	Mempercepat pengambilan keputusan dan respons kebijakan
8 Meningkatkan edukasi kepada masyarakat	Menjaga pola konsumsi yang rasional dan mendukung stabilitas harga
9 Mengembangkan digitalisasi monitoring inflasi	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
10 Memperkuat ketahanan pangan jangka panjang	Meningkatkan kemandirian pangan daerah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen TPID Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, pengendalian inflasi telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang mencakup monitoring harga, stabilisasi pasokan, pengawasan distribusi, Gerakan Pangan Murah, dan koordinasi lintas sektor. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini inflasi, meningkatkan produksi dan cadangan pangan, memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, memperkuat distribusi komoditas strategis, mengembangkan kerja sama antar daerah, serta memanfaatkan digitalisasi dalam pemantauan harga dan stok. Selain itu, penguatan edukasi masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan jangka panjang menjadi langkah strategis agar pengendalian inflasi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan stabilitas harga dapat lebih terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan ketahanan ekonomi Kabupaten Bondowoso menjadi semakin kuat.